BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian menjadi suatu tantangan besar dalam pembangunan, hal ini berpacu pada pertumbuhan ekonomi disetiap daerah mengalami penurunan yang signifikan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan sebagai bentuk kemandirian daerah terutama di tingkat desa dalam meningkatkan perekonomiannya. Penerapan otonomi daerah ini akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel serta dapat mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia berada di pedesaan, oleh sebab itu atensi pembangunan perlu diarahkan lebih banyak kepada pembangunan di pedesaan. Titik tumpu pembangunan tidak terkecuali terfokus pada pembangunan desa dengan segala aspeknya. Kondisi yang demikian ini diperkuat oleh adanya realitas sosial bahwa warga pedesaan masih dihinggapi permasalahan sosial yaitu kemiskinan, keterbelakangan serta berbagai bentuk kerawanan sosial lain. Untuk itu perlu adanya suatu usaha yang dilakukan secara terencana untuk mengatasi berbagai

permasalahan sosial yang ada di masyarakat desa sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan telah sejak lama dijalankan oleh pemerintah lewat berbagai jenis program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu aspek yang sangat dominan merupakan intervensi pemerintah sangat besar, dampaknya malah membatasi energi kreativitas serta inovasi warga desa dalam mengelola serta melaksanakan mesin ekonomi di pedesaan. Senada dengan pendapat Sandiasa dalam bukunya (2017: 64) yang menyatakan bahwa, "berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya pemberdayaan desa, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan oleh masyarakat yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri". Sistem serta mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efisien serta berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Sependapat dengan Mardiasmo (2002) yang mengatakan bahwa selama masa orde baru, harapan yang besar dari masyarakat desa untuk dapat membangun desanya berdasarkan kemampuan dan kehendak sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Ini disebabkan oleh adanya nuansa uniformitas (keseragaman) pada pola pendekatan sentralistik (*top-down*) yang dikembangkan. Dalam

menentukan kebijakan pembangunan pemerintah kurang memberikan keleluasaan (*local discreation*) kepada masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desa. Keadaan ini diperparah ketika kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah kurang mendukung kebijakan dan selama ini hanya "untuk mengatur rumah tangganya sendiri", tidak diiringi dengan pemberian infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan handal, serta pembiayaan yang mencukupi. Akibat yang terjadi dari fenomena tersebut bukan menciptakan suatu kemandirian desa namun malah ketergantungan desa terhadap pemerintah yang terus menerus terjadi.

Ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, dapat mengakibatkan masyarakat kurang merasa memiliki (*sense belonging*) terhadap hasil-hasil pembangunan, bahkan lebih lanjut menimbulkan akibat yang fatal dalam arti politis, yaitu memunculkan sikap apatis, frustasi, kecemburuan sosial dan ketidakpercayaan kepada pemerintah, dimana pada puncaknya sering menimbulkan ketegangan yang serius antara pemerintah dan rakyat, hal ini terlihat dari banyaknya contoh kasus-kasus yang memperlihatkan bahwa masyarakat sering menentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari suatu program pembangunan yang dibuat adalah dengan mengikutsertakan

partisipasi masyarakat sebagai suatu *conditio sine quanone* atau keharusan yang tidak bisa ditawar oleh berbagai pihak.

Belajar dari fenomena tersebut, maka selanjutnya terjadi perubahan paradigma dalam pembangunan desa seiring diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Konsep otonomi desa yang tertuang didalamnya memberikan kedudukan yang kuat bagi desa serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan yang sesuai pada kebutuhannya, pada prosesnya pembangunan secara bertahap telah bergeser mengarah kepada proses yang memungkinkan masyarakat untuk dapat terlibat secara keseluruhan dalam pembangunan (*participatory development*), dimulai dari (a) prakarsa (dari masyarakat), (b) perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya (oleh masyarakat), hingga kealokasian manfaatnya (untuk masyarakat). Kondisi ini didukung oleh pernyataan Suwignyo, bahwa hakikat pengertian pembangunan adalah dari, untuk dan oleh masyarakat, dengan demikian maka pembangunan dipedesaan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan bukan sebagai obyek pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan desa tersebut harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dan diiringi dengan partisipasinya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik, demokratis dan transparan. Oleh sebab itu penyelenggaraan pembangunan desa perlu untuk memperhatikan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpatisipasi dalam pembuatan peraturan desa seperti dalam pengusulan APBDes.

Hal ini mengisyaratkan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan desa benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang di butuhkan masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja peraturan yang ada di desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh desa hanya akan menghasilkan kesia-sian belaka dan masyarakat sendiripun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan pembangunan desa itu. Disisi lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa berperan aktif serta memiliki tanggung jawab penuh dalam menyusun peraturan desa. Partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan APBDes di desa tersebut sangat dibutuhkan.

Subari dalam Rahardjo (2006:3) menurut pendapat yang sama menyatakan bahwa pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama

masyarakat (*from and with people*) serta koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang berada di desa. Melalui proses ini terdapat keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan desa tetapi juga masyarakat dapat menumbuhkan nilai-nilai sosial lokal yang adiluhung, melawan pragmatism, memunculkan semangat kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok marginal dan mendorong kehidupan setara di masyarakat.

BUMDes di Desa Moncek Tengah merupakan salah satu BUMDes di Kabupaten Sumenep yang aktif dan berkembang dikarenakan partisipasi masyarakatnya yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam program BUMDes mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evalusi. BUMDes sebagai wadah untuk memperkuat perekonomian desa tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang suskesnya program-program dari BUMDes tersebut dapat tercapai secara optimal. Disatu sisi, dengan adanya badan pengawas yang dipilih dari beberapa orang di masyarakat dari BPD Desa serta masyarakat itu sendiri pun diikutkan dalam proses pengawasan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah Desa serta pengelola BUMDes untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan dan mengembangkan program BUMDes.

Partisipasi masyarakat di Desa Moncek Tengah terhadap kehadiran BUMDes terbilang cukup aktif dan responsif namun dalam realitasnya, tidak semua masyarakat di Desa Moncek Tengah ikut berpartisipasi dalam pengembangan BUMDes dikarenakan berbagai jenis alasan seperti tidak adanya waktu untuk ikut terlibat dalam program BUMDes ini terlihat pada banyaknya pemuda dan ibu-ibu yang keluar kota dan memilih untuk menetap disana. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masih minimnya sosialisasi dari pengurus BUMDes terkait program usaha BUMDes dan minimnya modal yang dimiliki oleh BUMDes ini dapat berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat. Kesibukan kerja juga menjadi penghalang karena mayoritas penduduk Desa Moncek Tengah berprofesi sebagai petani dan sisanya sebagai pedagang yang hampir tidak memiliki waktu dirumah. Maka dari uraian tersebut dijadikan oleh peneliti sebagai latar belakang memilih judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri di Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di ajukan adalah :

Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Moncek Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDes Mandiri di Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hal ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis karya penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasisiwa, peneliti, hingga masyarakat secara umum sebagai khazanah keilmuan khususnya mengenai partisipasi dalam pengembangan BUMDes.
2. Secara praktis diharapkan untuk memberi informasi, wawasan, dan masukan kepada instansi dan Organisasi Masyarakat setempat untuk lebih mandiri dalam mengembangkan program BUMDes, melainkan juga memberikan manfaat positif baik bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun pemerintah Desa Moncek Tengah agar dapat terus mengevaluasi program demi terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Desa Moncek Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat teori-teori apa saja yang mendukung permasalahan dari penelitan yang dilakukan. Teori-teori tersebut saya dapatkan dari berbagai referensi yang mendukung penelitian ini. Kemudian dengan kerangka teoritis yang ada untuk memudahkan peneliti menyelesaikan laporan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang Desa Moncek Tengah dan BUMDes MANDIRI Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang dideskripsikan secara rinci sesuai kebutuhan saya.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian terpenting karena memuat hasil analisis data dari temuan-temuan penelitian yang dijabarkan dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan program BUMDes MANDIRI akan dibahas secara rinci.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sebagai bentuk pertimbangan pada penelitian selanjutnya.